

Judul : Bentuk panja pembiayaan, komisi VII akan serius bantu pelaku UMKM
Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bentuk Panja Pembiayaan

Komisi VII Akan Serius Bantu Pelaku UMKM

SENAYAN sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Akses Pembiayaan terhadap Permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf) dalam mendapatkan modal.

Anggota Komisi VII DPR Samuel JD Wattimena mengatakan, persoalan akses modal bagi UMKM masih menjadi tantangan ke depan. Kendati Pemerintah telah menetapkan pinjaman di bawah Rp 100 juta tidak memerlukan agunan, tapi di lapangan, persyaratan tersebut masih menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha.

Karena itu, kemudahan akses pembiayaan akan menjadi salah satu fokus Panja. "Saat ini masih perlu kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku ekraf dan UMKM," ujar Samuel di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Samuel mengungkapkan, selama ini pelaku ekraf dan UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan. Alasannya, karya intelektual mereka belum dapat dimanfaatkan sebagai agunan. Karena itu,

Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) saat ini tengah melakukan pembinaan terhadap validator hak kekayaan intelektual (HKI).

Kehadiran validator tersebut, harap Samuel, dapat menjadi dasar penilaian atas nilai ekonomi suatu karya sehingga dapat dimanfaatkan dalam skema pembiayaan bersama Kementerian UMKM dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). "Saat ini masih proses uji coba, setelah itu validator HKI ini akan dimanfaatkan oleh Kementerian UMKM bersama Himbara," kata politisi PDIP ini.

Komisi VII DPR, tegas Samuel, akan terus mengawal upaya perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan ekraf. Kemudahan masyarakat memperoleh pinjaman melalui rentenir atau pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi peringatan layanan pembiayaan formal agar semakin mudah dijangkau.

"Masyarakat jauh lebih mudah mengambil pinjaman hanya dengan modal KTP. Tapi di belakangnya ada risiko yang tidak bisa kita kontrol," kata legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Anggota Komisi VII DPR Gandung Pardiman menam-



Samuel JD Wattimena

bahkan, UMKM dan pelaku ekraf merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun terkendala akses permodalan dari perbankan. Tentunya ini perlu dikawal dengan baik sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Gandung ingin Panja dapat memperluas akses pembiayaan dengan mendorong perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga keuangan untuk membuat produk khusus UMKM dan ekraf dengan agunan ringan, proses cepat serta penguatan ekosistem ekraf. Caranya

Pemerintah menyediakan dana bergulir, hibah produktif, dan kurasi pasar agar produk UMKM dan ekraf bisa naik kelas hingga ekspor. "Jadi hal yang paling urgen adalah edukasi literasi keuangan," tandas politisi Golkar ini.

Dia ingin ada pendampingan dari Pemerintah dan pihak terkait agar pelaku UMKM paham cara mengelola keuangan, pembukuan, dan memenuhi persyaratan kredit. Pasalnya, hal ini yang sering disepelekan oleh pengusaha UMKM dan ekraf. Karena itu, kesadaran literasi keuangan perlu ditumbuhkan.

Bila akses modalnya lancar, kata Gandung, UMKM akan tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi daerah bergerak. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi nasional. "Jadi Panja bisa segera menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang berpihak kepada pelaku UMKM," harap dia.

Senada, anggota Komisi VII DPR Ilham Permana meminta Pemerintah memperkuat akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekraf. Persoalan akses pembiayaan dinilai masih menjadi salah satu ham-

batan utama bagi dua sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional.

"UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap sekitar 90 persen tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional," ujar Ilham di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Begitu juga dengan ekraf, lanjut Ilham, mulai menjadi kekuatan baru yang bertumpu pada talenta, ide, inovasi, dan kreativitas. Namun, besarnya kontribusi kedua sektor tersebut belum sepenuhnya diikuti kemudahan dalam memperoleh akses permodalan. "Dua sektor ini untuk mengakses pembiayaan dan permodalan masih sangat sulit," kata dia.

Ilham berharap, Panja ini bisa mengurai persoalan tersebut secara lebih mendalam. Termasuk mengidentifikasi hambatan struktural dan regulasi yang selama ini membuat pelaku usaha kesulitan mengakses pembiayaan formal. Karena itu, kebijakan pembiayaan, termasuk KUR perlu diikuti dengan literasi dan pendampingan yang memadai. ■ TIF